



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)

UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YULIANTO SUDRAJAT
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 629210

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 2.330.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 192 m2/170 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 865.000.000
2. Tanah Seluas 115 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, Rp. 310.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 71 m2/69 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 385.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 13 m2/13 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 215.000.000
5. Tanah Seluas 130 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 245.000.000
6. Tanah Seluas 88 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 155.850.000
7. Tanah Seluas 87 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 154.150.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 131.350.000**

1. MOTOR, HONDA SKUTIC Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 4.850.000
2. MOTOR, YAMAHA SPORT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000



3. MOBIL, TOYOTA YARIS 1.5J A/T Tahun 2009, HASIL SENDIRI
Rp. 58.500.000
4. MOTOR, VESPA MATIC 155CC Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.
57.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 3.300.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 795.609.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.260.259.000

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.260.259.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.